

PENERAPAN AKUNTANSI SAK EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA PEKANBARU

Nuraini¹; Arfah Piliang²; Nisa Alqorni³; Candra Irawan⁴; Rasmon⁵

^{1,3}Institut Az Zuhra

Jln. Melati No.16, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292

^{2,4,5}STIE Mahaputra Riau

Jln. Paus No.52 Tangkerang Barat, Pekanbaru 28282 Telp.(0761)859050

E-mail : arfahpiliang22@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The purpose of this study is to find out whether MSMEs in Binawidya District, Pekanbaru City have implemented SAK EMKM in compiling financial statements. The researcher used purposive sampling in obtaining research samples. Where the informants involved in this study are MSME owners/managers consisting of 35 business actors. Data collection was carried out by interview and documentation techniques. The result of this study is that the MSMEs studied have not implemented SAK EMKM in the preparation of financial statements. MSME actors only make business activity reports consisting of recording income and expenses in accordance with the understanding of each MSME owner.

Keywords: *Accounting; SAK EMKM; Financial Statements*

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Kehadiran UMKM juga berkontribusi dalam pemerataan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan laporan keuangan yang akurat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah pemahaman dan penerapan sistem akuntansi yang tepat (Piliang et al., 2020). Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun cenderung tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak memberikan gambaran

yang jelas mengenai kesehatan finansial usaha.

Di Indonesia, untuk mendukung UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur, pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM adalah pedoman akuntansi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM, yang diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat. Meskipun standar ini telah diperkenalkan, banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkannya dalam praktik mereka (Hidayat et al., 2022).

Penerapan SAK EMKM di Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi yang besar dan banyak pelaku UMKM, menjadi sangat penting (Bastian, 2024). Namun, data yang ada menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di kota ini belum sepenuhnya mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Hal ini berdampak pada

ketidakmampuan mereka untuk mengukur kinerja keuangan secara akurat, yang pada gilirannya menghambat pengambilan keputusan yang tepat serta akses terhadap pendanaan dari lembaga keuangan (Piliang et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan di UMKM Kota Pekanbaru. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar tersebut, serta mendukung pengelolaan keuangan UMKM yang lebih baik dan lebih transparan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah pemahaman dan penerapan sistem akuntansi yang tepat (Piliang et al., 2020). Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun cenderung tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan finansial usaha.

Di Indonesia, untuk mendukung UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur, pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM adalah pedoman akuntansi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM, yang diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat. Meskipun standar ini telah diperkenalkan, banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkannya dalam praktik mereka (Hidayat et al., 2022).

Penerapan SAK EMKM di Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi yang besar dan banyak pelaku UMKM, menjadi sangat penting (Bastian, 2024). Namun, data yang ada menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di kota ini belum sepenuhnya mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk mengukur kinerja keuangan secara akurat, yang pada gilirannya menghambat pengambilan keputusan yang tepat serta akses terhadap pendanaan dari lembaga keuangan (Piliang et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan di UMKM Kota Pekanbaru. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar tersebut, serta mendukung pengelolaan keuangan UMKM yang lebih baik dan lebih transparan.

SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (Khaidir, 2021). Menurut SAK EMKM (2016) terdapat tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang lebih mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan keuangan. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia (SAK IAI) merancang SAK EMKM pada tahun 2016. Namun, SAK EMKM baru dapat digunakan mulai efektif per 1 Januari 2018.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Ruang lingkup pada SAK EMKM dimana terdapat entitas mikro, kecil, dan menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang didefinisikan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut (SAK EMKM, 2016).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, yang dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (pasa 1 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang (pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Sedangkan definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku strategi internasionalisasi UMKM (Thamrin, 2017) berdasarkan jumlah tenaga kerja pada unit usaha yaitu:

1. Usaha rumah tangga merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 1 sampai 5 orang.
2. Usaha kecil menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 6 orang sampai dengan 19 orang.
3. Usaha menengah merupakan

Kriteria Entitas Mikro Kecil Menengah

Kategori entitas mikro, entitas kecil, serta entitas menengah berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB I Pasal 1 (IAI, 2016), yaitu:

1. Tolak ukur entitas mikro yaitu mempunyai harta neto paling banyak Rp 50.000.000 dan di dalamnya tidak termasuk berupa tanah maupun gedung untuk usahanya atau mendapatkan hasil penjualan tahunan maksimal sebesar Rp 300.000.000.
2. Tolak ukur entitas kecil adalah mempunyai harta neto lebih dari Rp 50.000.000 sampai yang paling banyak sebesar Rp 500.000.000 dan di dalamnya tidak termasuk berupa tanah dan gedung untuk usahanya atau mendapatkan hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 sampai maksimal sebesar Rp 2.500.000.000.
3. Tolak ukur entitas menengah adalah mempunyai harta neto lebih dari Rp 500.000.000 maksimal sampai Rp 10.000.000.000 dan di dalamnya tidak termasuk di dalamnya berupa tanah dan gedung untuk usahanya atau mendapatkan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 maksimal sampai sebesar Rp 50.000.000.000.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, melacak arus kas, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik (Rosyidah et al., 2022).

Penyusunan suatu laporan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang akan bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK No. 1 telah mengungkapkan beberapa hal mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut: (1) untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi (2) laporan keuangan disajikan dapat menunjukkan hasil pertanggungjawaban dari pihak manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercaya kepadanya (3) informasi-informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat membantu para pengguna laporan tersebut dalam memprediksi arus kas yang diperoleh perusahaan dimasa yang akan datang (Piliang & Tinaria, 2024).

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib juga sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum (Arip et al., 2023).

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan dibagi menjadi:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya.

- b. Memberikan informasi sumber kekayaan.
- c. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan asset dan kewajiban.
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan SAK EMKM mensyaratkan entitas menyajikan informasi yang wajar, menurut SAK EMKM (2016) penyajian informasi yang wajar untuk mencapai tujuan:

1. Relevan adalah informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan yang relevan dan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasinya dimasa lalu (Lubis, 2017).
2. Representatif tepat adalah informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi memiliki kualitas dengan menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar (Lubis, 2017).
3. Keterbandingan adalah informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan entitas. Dengan adanya perbandingan laporan keuangan, dapat mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatifve (Lubis, 2017).
4. Keterpahaman adalah informasi yang diberikan dapat dimengerti

bagi pemakai. Pemakai dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup serta keinginan untuk mendalami informasi (Lubis, 2017).

Penerapan SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2016) indikator dalam penerapan SAK EMKM melakukan pencatatan keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh IAI terdiri atas 3 macam:

1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam pengembangan usaha laporan keuangan menjadi acuan untuk membuat perencanaan usaha dimasa depan. Salah satu dengan melihat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan keuangan (SAK EMKM, 2016). Adapun definisi dari bagian-bagian posisi keuangan yaitu:

- a. Aset merupakan sumber daya yang dapat dinikmati oleh suatu usaha yang disebabkan oleh kejadian masa lampau dengan memanfaatkan secara ekonomi dapat diharapkan dimasa yang akan datang bagi suatu usaha seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan dan aset tetap (SAK EMKM, 2016).
- b. Liabilitas merupakan kewajiban yang disebabkan oleh kegiatan usaha dimasa lampau yang mempengaruhi arus keluar kas dari dengan adanya manfaat dari sumber daya tersebut seperti utang usaha dan utang bank (SAK EMKM, 2016).
- c. Ekuitas merupakan selisih pengurangan antara aset dengan seluruh kewajiban (SAK EMKM, 2016).

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah gambaran dari prestasi usaha untuk suatu periode. Menurut SAK EMKM (2016) adapun bagian dari kinerja usaha pada laporan laba rugi yaitu:

- 1) Penghasilan (*income*) merupakan meningkatnya kegunaan ekonomi yang berupa peningkatan aset, arus kas masuk atau menurunnya kewajiban yang menyebabkan naiknya ekuitas

yang tidak berasal dari pemodal selama waktu pelaporan (SAK EMKM, 2016).

- 2) Beban (*expenses*) merupakan berkurangnya manfaat ekonomi yang berupa pengurangan terhadap penggunaan aset, arus kas keluar atau meningkatnya kewajiban yang menyebabkan pengurangan ekuitas yang tidak disebabkan oleh penanaman modal selama periode pelaporan seperti beban keuangan dan beban pajak (SAK EMKM, 2016).
- 3) Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Berdasarkan SAK EMKM (2016) catatan atas laporan keuangan memuat tentang:
 3. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
 - b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
 - c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan diperoleh dengan menggunakan data primer. Data primer disini adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau interview langsung dengan pengelola atau pemilik UMKM yang ada di Kecamatan Binawidya. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang melakukan pencatatan transaksi keuangan. Jadi, sampel yang memenuhi kriteria untuk diteliti sebanyak 35 UMKM.

HASIL

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti pada para pelaku UMKM, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa entitas usaha belum melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut informasi dari entitas usaha mereka belum mengetahui bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Para pelaku UMKM sering mengabaikan pencatatan keuangan padahal hal tersebut sangat penting bagi setiap usaha apa pun. Dengan adanya pencatatan keuangan para pelaku itu dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran dengan baik setiap harinya.

Para pelaku UMKM hanya menyajikan laporan usaha berupa pencatatan pemasukan/penjualan dan pengeluaran setiap transaksi. Laporan pemasukan/penjualan berisikan nama dan jumlah produk/barang yang laku terjual serta harga jualnya. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SAK EMKM antara lain:

1. Keterbatasan Pengetahuan: Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai standar akuntansi yang berlaku, terutama SAK EMKM.
2. Keterbatasan Sumber Daya: UMKM sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti tenaga akuntan atau perangkat teknologi untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai standar.
3. Biaya: Beberapa UMKM merasa bahwa biaya untuk mempekerjakan akuntan atau mengikuti pelatihan akuntansi terlalu tinggi, sehingga mereka enggan untuk menerapkan SAK EMKM.

Namun, penerapan SAK EMKM yang telah dilakukan oleh sebagian UMKM memberikan manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Keakuratan Laporan Keuangan: Penerapan SAK EMKM meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang pada gilirannya membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan usaha.
2. Akses Pembiayaan: Laporan keuangan yang sesuai standar mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan

dari pihak ketiga, seperti bank atau investor.

3. Transparansi dan Kepercayaan: UMKM yang menyusun laporan keuangan yang transparan cenderung lebih dipercaya oleh pelanggan dan mitra bisnis.

PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut informasi dari entitas usaha mereka belum mengetahui bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Mereka hanya mengetahui laporan keuangan yang disebut dengan pembukuan. Catatan atau pembukuan yang digunakan oleh entitas usaha masih dilakukan secara manual seperti menggunakan buku yang berisi pencatatan keuangan sederhana yang berisi uang masuk dan pengeluaran dari kegiatan operasional usahanya (Ayudhi, 2020). Beberapa entitas usaha juga memberikan alasan bahwa sudah cukup puas dengan melakukan pencatatan yang sederhana. Karena pencatatan yang sederhana sudah memberitahukan kondisi usaha mereka.

Para pelaku UMKM sering mengabaikan pencatatan keuangan padahal hal tersebut sangat penting bagi setiap usaha apa pun. Dengan adanya pencatatan keuangan para pelaku itu dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran dengan baik setiap harinya. Setiap usaha setidaknya wajib mengetahui biaya operasional usahanya, keuntungan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk usaha (Ayudhi, 2020). Dengan demikian, entitas usaha juga dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga perencanaan pengembangan usaha dapat ditetapkan berdasarkan pencatatan tersebut.

Dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan usahanya masing-masing. Pencatatan yang mereka lakukan merupakan pencatatan sederhana yang hanya bersumber

dari bukti transaksi (Hans, 2019). Namun pencatatan dan bukti transaksi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM hanya sekedar mengetahui pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan jual beli yang dilakukan. Pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, mereka hanya mencatat transaksi penjualan atau transaksi lainnya sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka masing-masing dalam pengelolaan usahanya. Dalam penelitian ini bisa diketahui bahwa para pelaku UMKM tidak mengetahui SAK EMKM karena pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan SAK EMKM. Akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan SAK EMKM tidak terdapat di dalam pencatatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 35 UMKM yang diteliti di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yaitu pengetahuan dan pemahaman yang minim tentang laporan keuangan dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang rumit serta membutuhkan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Para pelaku usaha melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran setiap transaksi usahanya. Padahal laporan yang mereka lakukan tersebut masih sangat jauh dari standar akuntansi keuangan. Laporan yang dibuat digunakan untuk mengatur pengelolaan keuangan, seperti dalam mengetahui laporan laba/rugi yang dihasilkan oleh masing-masing pelaku UMKM. Penerapan SAK EMKM yang sesuai dengan standar belum dilaksanakan oleh 35 UMKM yang diteliti. Komponen laporan keuangan yang sesuai dengan standar berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan belum ditemukan dalam laporan keuangan yang

disusun oleh para pelaku UMKM yang diteliti. Dengan demikian, 35 UMKM tersebut belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan kepada pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif terkait penyusunan laporan keuangan, sehingga diharapkan para pelaku UMKM dapat mengubah mindset bahwa penyusunan laporan keuangan itu mudah dan memberikan banyak manfaat buat mereka terutama kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan maupun program-program kucuran dana dari pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM di Kota Pekanbaru masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, bagi UMKM yang telah menerapkannya, manfaat yang diperoleh sangat signifikan, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun akses pembiayaan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga pendidikan, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai SAK EMKM kepada pelaku UMKM, serta memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk penerapannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arip, H., Karim, N. K., & Kartikasari, N. (2023). Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Di Kecamatan Pringgabaya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 135–144. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.417>
- Ayudhi, L. F. R. S. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Umkm di Kota Padang. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i1.17>

- Bastian, E. (2024). performance : Evidence from startup companies in Indonesia ” Effect of learning culture and management control system on innovation performance : Evidence from startup companies in Indonesia. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.20](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.20)
- Hans, K. (2019). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS (IAI). 978-979-9020-57-4. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/akuntansi_keuangan_berdasarkan_sak_berbasis_ifrsedisike-4
- Hidayat, R., Piliang, A., Safrizal, S., & Sugianto, S. (2022). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Cititel Sisingamangaraja Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(05), 131–136. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i05.523>
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah, September, 1–54. http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf
- Khaidir, W. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Sak Emkm) Oleh Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(2), 260–274. <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i2.632>
- Piliang, A., Kirmizi, & Basri, Y. M. (2020). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia (Arfah Piliang, Kirmizi & Yesi Mutia Basri). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 1–13.
- Piliang, A., Meutia, Bastian, E., & Muchlish, M. (2023). Use of Enabling Levers and Constraining Levers to Radical Innovation: Intervention of Knowledge Sharing and Technological Turbulence. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2302. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2302>
- Piliang, A., & Tinaria, L. (2024). DAN TURBULENSI TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN PERFORMANCE : INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA. Firmaiansyah 2014.
- Rosyidah, K. L., Ariningsih, S., & Wijayanti, R. (2022). Analisis Penerapan Sak-Emkm Pada Pelaku Usaha Kecil, Dan Pelaku Usaha Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 66–75. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.310>